

## **PELUANG BAHASA INDONESIA SEBAGAI NILAI KEARIFAN PADA PIDATO PRESIDEN RI TAHUN 2019**

**Dina Purnama Sari**

Program Studi Bahasa Inggris (DIII), Fakultas Komunikasi dan Bahasa,  
*Universitas Bina Sarana Informatika*  
dina.dms@bsi.ac.id

### **ABSTRAK**

*Saat ini, perkembangan bahasa Indonesia cukup pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaannya yang semakin meluas baik di dalam maupun luar negeri. Penggunaan bahasa itu dilaksanakan dari berbagai bidang ilmu baik verbal maupun nonverbal, salah satunya adalah Pidato Presiden Republik Indonesia (RI), Bapak Joko Widodo. Dengan berbahasa Indonesia, Presiden RI telah memberikan peluang bagi pengembangan bahasa tersebut sebagai nilai kearifan. Penggunaan bahasa Indonesia pada pidato kenegaraan presiden RI dilakukan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres tersebut merupakan pengganti Perpres Nomor 16 Tahun 2010 yang dilakukan pada Presiden RI sebelumnya, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sehubungan dengan latar belakang masalah, metode yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tinjauan literatur sebagai pengumpulan data berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia. Data-data yang dianalisis merupakan data sekunder dari media online. Tujuan umum penulisannya untuk dipublikasikan pada Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pamulang, Sabtu, 23 November 2019, yang bertema “Perkembangan Bahasa dan Sastra Indonesia Masa Kini” serta e-prosiding. Tujuan khususnya adalah agar bahasa Indonesia berpeluang sebagai bahasa pemersatu bangsa, media informasi dan komunikasi pembelajaran, serta dikenal oleh negara lainnya. Selain itu, dengan menggunakan bahasa Indonesia pada pidato presiden RI, diharapkan terdapat nilai kearifannya. Nilai-nilai tersebut tercermin melalui penggunaan kosakata yang santun dan baku, kalimat efektif, serta bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai konteksnya. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya penggunaan bahasa Indonesia yang disampaikan melalui pidato presiden RI, maka diharapkan peluang bahasa tersebut dapat dikenal masyarakat baik dalam maupun luar negeri sehingga penyebarannya semakin meluas dan berdampak positif pada bidang lainnya.*

**Kata Kunci:** *pidato, nilai, bahasa Indonesia*

### **PENDAHULUAN**

Pidato merupakan salah satu jenis bahasa verbal dan nonverbal. Bahasa verbal karena disampaikan lisan di hadapan para pendengarnya. Bahasa nonverbal karena sebelum pidato disampaikan pembicara atau presenter di hadapan pendengarnya, terdapat penyusunan teksnya. Dengan demikian, maka berpidato merupakan salah satu proses komunikasi verbal dan nonverbal didukung oleh aspek nonbahasa. Misalnya, ekspresi wajah, kontak pandang, dan intonasi suara. Berkaitan dengan hal tersebut, pembahasannya dibatasi pada penyampaian bahasanya, khususnya pada penggunaan kosakata yang santun dan baku, kalimat efektif serta bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai konteksnya. Adapun, pidato yang dibahas pada penelitian ini adalah Pidato Presiden Republik Indonesia (RI), Bapak Jokowi Widodo, periode tahun 2019, yaitu Pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 Jakarta, 20 Oktober 2019. Selain penyampaian bahasa, pembahasannya juga ditinjau dari aspek nilai kearifan karena berkaitan dengan peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Hal tersebut disebabkan perkembangan bahasa Indonesia yang cukup pesat dipergunakan oleh penggunanya baik di dalam maupun di luar Indonesia.

Dengan menggunakan bahasa Indonesia, Presiden RI, Bapak Jokowi Widodo, telah melaksanakan sesuai Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang termuat pada beberapa pasal, di antaranya, Pasal 1, Ayat 1; Pasal 2 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5; dan Pasal 3, Ayat 1, 2, 3, dan 4. Selain itu, pasal lainnya adalah Pasal 5 dan 7. Pada pasal-pasal tersebut

menguatkan bahwa pidato kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden RI dapat dilakukan dengan bahasa Indonesia baik forum nasional maupun internasional. Jadi, dengan penggunaan bahasa Indonesia melalui pidato tersebut, Presiden RI telah membantu mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa, yaitu berbahasa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah bagaimana peluang bahasa Indonesia sebagai nilai kearifan pada Pidato Presiden RI Tahun 2019?

Identifikasi masalahnya adalah berkaitan dengan kajian bahasa yang terdiri dari kosakata yang santun dan baku, kalimat efektif, serta bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, nilai kearifan. Identifikasi masalahnya berkaitan dengan temuan pada pidato Presiden RI Tahun 2019, khususnya Pidato Presiden RI pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Periode 2019-2024, di Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 2019.

Metode yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tinjauan literatur sebagai pengumpulan data berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia. Data-data yang dianalisis merupakan data sekunder dari media *online*.

Tujuan penulisannya terdiri dari dua macam, yaitu umum dan khusus. Tujuan umum penulisannya untuk dipublikasikan pada Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pamulang, Sabtu, 23 November 2019, yang bertema “Perkembangan Bahasa dan Sastra Indonesia Masa Kini” serta *e-prosiding*. Tujuan khususnya adalah agar bahasa Indonesia berpeluang sebagai bahasa pemersatu bangsa, media informasi dan komunikasi pembelajaran, serta dikenal oleh negara lainnya

### **TEORI DAN METODOLOGI**

Nilai Kearifan. Nilai kearifan merupakan nilai-nilai baik dan benar yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan norma yang berlaku di keluarga dan masyarakat. Dasar nilai-nilai kearifan tersebut dipahami berdasarkan pembentukan karakter di dalam keluarga yang kemudian berkembang di masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal. Nilai-nilai kearifan tersebut disesuaikan dengan pengalaman serta latar belakang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik setiap keluarga dan masyarakat di dalamnya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nilai kearifan dapat dikembangkan dan dilestarikan sesuai dengan perkembangan zaman dan hal ini merupakan peluang bagi pelaku di dalamnya. Selain itu, nilai kearifan tersebut berkaitan juga dengan kearifan lokal (*local wisdom*). Menurut Nur Syam, kearifan lokal merupakan suatu pandangan bahwa setiap entitas masyarakat memiliki seperangkat pengetahuan budaya yang mengagungkan budayanya sebagai suatu pola untuk menginterpretasikan tindakannya. Lokalitas, menurut Nur Syam, merupakan konsep bahwa setiap entitas masyarakat berada di dalam lokus sosial budaya dan geografis yang kurang lebih tetap dan melakukan tindakan sesuai dengan lokalitasnya tersebut. Pengertian kearifan lokal lainnya, menurut Achmad Dardiri, adalah sebuah tema *humaniora* yang diajukan untuk memulihkan peradaban dari krisis modernitas. Ia diunggulkan sebagai “pengetahuan” yang “benar” berhadapan dengan standar “saintisme” modern yaitu semua pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan positivisme (suatu cara penyusunan pengetahuan melalui observasi gejala untuk mencari hukum-hukumnya). Secara umum, menurut Nanik Dara Senjawati, *local wisdom* adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya. Dengan adanya kearifan lokal, maka memberikan peluang bagi bahasa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal baik nasional maupun internasional bagi penggunaannya.

Berkaitan dengan topik penelitian, maka kajian teori pembahasannya dibatasi pada kajian bahasa Indonesia, yaitu kosakata yang santun baku, kalimat efektif, serta berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kosakata merupakan sekumpulan kata yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari bahasa tertentu. Kosakata dapat diketahui melalui bahasa verbal maupun nonverbal. Bahasa verbal diucapkan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada lawan bicaranya. Kosakata verbal juga dapat dilakukan monolog. Kosakata nonverbal dapat diketahui melalui tesaurus, kamus, ensiklopedia, media massa, dan bacaan lainnya. Salah satu kosakata yang dapat dipergunakan adalah penggunaan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada PUEBI, diketahui kosakata yang santun dan baku. Selain PUEBI, aturan lainnya terdapat pada tata bahasa Indonesia baku.

Menurut E. Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai (2015: 150), kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti pada apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat tersebut mengutamakan keefektifan informasi sehingga kejelasannya kalimatnya dapat terjamin. Ciri kalimatnya yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Definisi lainnya mengenai kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili ide pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan ide yang sama tepatnya dengan pikiran pendengar atau pembaca dengan syaratnya adalah kesepadanan dan kesatuan gagasan, kelogisan, keparalelan, penekanan atau ketegasan, kehematan, kepaduan, serta kecermatan (Ramlan A. Gani, 2014: 68–69). Pemahaman lain mengenai kalimat efektif, menurut Suyatno dkk (2014: 101), kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud penulis atau pembicaranya dengan memenuhi, paling tidak enam syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya sesuai dengan yang dimaksud penutur atau penulis dengan persyaratan tertentu, di antaranya kesatuan, kepaduan, kehematan, kelogisan, keparalelan, dan kecermatan.

Berbahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia. Bahasa yang baik dan benar, menurut Suyatno dkk (2014: 12), yaitu bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakainya dan bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Pemahaman lainnya mengenai bahasa yang baik dan benar, menurut E. Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai (2015: 27), bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi pemakainya sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah bahasa dengan konsisten. Menurut Ramlan A. Gani (2014: 5–6), bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku atau situasi pada

saat bahasa digunakan, biasanya sesuai dengan perasaan atau emosi sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang baik disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi penggunaannya dan benar digunakan secara konsisten sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku.

Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tinjauan literatur berdasarkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian, menurut McMillan dan Schumacaher dalam (Syamsuddin A.R. dan Vismaia S. Damaianti, 2015: 73). Dengan demikian, pada penelitian ini, para peneliti mampu menginterpretasikan segala fenomena dan tujuan melalui sebuah penjelasan. Pendapat lainnya, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Straus dan Corbin dalam Syamsuddin A.R. dan Vismaia S. Damaianti, 2015: 73). Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menganalisis yang diteliti agar diperoleh informasi mengenai perilaku mereka, serta dapat menghasilkan sebuah teori (Syamsuddin A.R. dan Vismaia S. Damaianti, 2015: 74). Menurut M. Zain (2014: 13), metode kualitatif mencerminkan suatu *perspektif fenomenologis*. Artinya, penelitian yang menggunakan perspektif fenomenologis ini berusaha untuk memahami makna dari peristiwa-peristiwa dan interaksi-interaksi manusia dalam situasi tertentu. Data deskriptif yang dikumpulkan dalam penelitian bahasa adalah gejala bahasa berupa kata-kata, bukan angka-angka (M. Zain, 2014: 14). Dengan demikian, penelitian bahasa harus memerikan gejala yang ada sesuai dengan kenyataan dan sangat bermakna karena berupa pendeskripsian kenyataan yang ada. Selain itu, tidak ada intervensi peneliti untuk membuat rumusan yang berbeda dari apa yang telah ditemukan di lapangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, metodologi penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan fenomena yang terjadi adalah metodologi yang dilakukan berdasarkan penelitian melalui prosedur ilmiah tanpa statistik dan bentuk hitungan lainnya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan serta peneliti tidak terlibat intervensi pada penelitian tersebut agar sesuai kenyataan dan bermakna.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan latar belakang masalah, berikut adalah temuan penelitiannya:

**PIDATO PRESIDEN RI PADA SIDANG PARIPURNA MPR RI  
DALAM RANGKA PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH PERIODE  
2019-2024, Jakarta, 20 Oktober 2019**

*Bismillahirrahmanirrahim...*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,  
Om Swastyastu, Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati para Pimpinan dan seluruh anggota MPR RI;  
Yang saya hormati Bapak Prof Dr KH Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia;  
Yang saya hormati Ibu Hj Megawati Soekarnoputeri, Presiden ke-5 Republik Indonesia;

Yang saya hormati Bapak Prof Dr Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia;  
Yang saya hormati Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia;  
Yang saya hormati Bapak Prof Dr Boediono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia;  
Yang saya hormati Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia;

Yang mulia yang saya hormati kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat;

Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara;

Dan tentu saja, sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno, para tamu yang saya hormati;

Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sebangsa dan se-Tanah Air,

Mimpi kita, cita-cita kita, di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya Insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.

Itulah target kita. Itulah target kita bersama.

Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS dan Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung-hitung, kita sudah kalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai.

**Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru.**

Namun, semua itu tidak datang otomatis. Tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras dan kita harus kerja cepat. Harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif.

Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang sangat kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton.

Harusnya, inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya.

Ini cerita sedikit. Lima tahun yang lalu, tahun pertama saya di istana, saya mengundang pejabat dan masyarakat untuk halal-bihalal. Protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut. Tahun pertama, saya ikut.

Tahun kedua, ada halal-bihalal lagi. Protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bisik-bisik, saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan menjadi kebiasaan, di titik itu lagi. Dan itu akan dianggap sebagai aturan. Dan kalau diteruskan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.” Duduknya apa, berdirinya di situ terus. Ini yang namanya monoton dan rutinitas.

Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita. Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil, hasil yang nyata.

Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Saya sering mengingatkan kepada para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan. Sering kali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai.

Kalau ditanya, jawabnya “Programnya sudah terlaksana, Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.

Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya. Yang utama itu adalah hasilnya.

Dan cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Di situ ada *sent*, artinya telah terkirim. Ada *delivered*, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin *delivered*, bukan hanya menjamin *sent*.

Dan saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya *sending-sending* saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat.



Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja.

Tapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar, jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif.

Oleh karena itu, lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan:

**Yang pertama**, pembangunan SDM. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita.

Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan kita.

Itu pun, tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu *endowment fund* yang besar untuk manajemen SDM kita.

Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

**Yang kedua**, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan.

Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

**Yang ketiga**, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang *pertama*, UU Cipta Lapangan Kerja. Yang *kedua*, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi *omnibus law*, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus.

**Yang keempat**, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran.

Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa enggak kebanyakan?

Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sakali lagi saya pastikan, pasti saya copot.

Pada akhirnya, **yang kelima** adalah transformasi ekonomi.

Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Drs Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama 5 tahun terakhir.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama 5 tahun ini, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air untuk bersama-sama berkomitmen:

*Pura babbara' sompeku...  
Pura tangkisi' golikku...  
Layarku sudah berkembang...  
Kemudiku sudah terpasang...  
Kita bersama, menuju Indonesia maju!!!*

Terima kasih,  
*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Semoga Tuhan Memberkati,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,  
Namo Buddhaya,  
Salam kebajikan.*

Sumber: <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>:

Sehubungan dengan temuan penelitian yang dikaji melalui deskriptif kualitatif berdasarkan fenomena dan data yang diperoleh adalah data sekunder, maka berikut adalah pembahasannya yang berkaitan dari aspek nilai kearifan dan kajian bahasa. Kearifan yang dikaji berkaitan nilai kearifan lokal. Kajian bahasa terdiri dari kosakata yang santun dan baku, kalimat efektif, serta bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Beberapa nilai kearifan yang terdapat pada temuan data pidato, yaitu:

1. Harusnya, inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya. Ini cerita sedikit. Lima tahun yang lalu, tahun pertama saya di istana, saya mengundang pejabat dan masyarakat untuk halal-bihalal. Protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut. Tahun pertama, saya ikut. Tahun kedua, ada halal-bihalal lagi. Protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bisik-bisik, saya bilang ke Mensesneg, "Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan menjadi kebiasaan, di titik itu lagi. Dan itu akan dianggap sebagai aturan. Dan kalau diteruskan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang." Duduknya apa, berdirinya di situ terus. Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita. Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil, hasil yang nyata.

Pada nilai kearifan nomor (1), diketahui bahwa inovasi merupakan salah satu produk budaya dan bukan hanya pengetahuan. Hal tersebut diperkuat dengan pengalaman pribadi Presiden RI, Joko Widodo, yang dituangkan dalam pidatonya pada baris pertama hingga ketujuh. Dengan adanya pengalaman Presiden RI, Joko Widodo, diketahui bahwa kehadiran nilai kearifan dapat dijadikan hal baik untuk meningkatkan produktivitas dan prioritas baik proses maupun hasil.

2. **Yang pertama**, pembangunan SDM. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan kita. Itu pun, tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu *endowment fund* yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

**Yang kedua**, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

**Yang ketiga**, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. **Yang pertama**, UU Cipta Lapangan Kerja. **Yang kedua**, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi *omnibus law*, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan

UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus.

**Yang keempat**, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sakali lagi saya pastikan, pasti saya copot.

Pada akhirnya, **yang kelima** adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada temuan data nomor (2) nilai kearifan data, diperoleh hasil bahwa kelima isi pidato tersebut melaporkan mengenai kelanjutan rencana Presiden RI, Joko Widodo, Periode 2019 – 2024. Rencana tersebut disusun dalam lima hal, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelimanya disusun berdasarkan potensi demografi Indonesia serta tantangan dan peluang sumber daya manusia yang jumlahnya cukup banyak. Dengan demikian, maka nilai kearifan dihadirkan pada pidato presiden tersebut.

Pada penulisan naskah pidato, hakikatnya menuangkan gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis yang siap dilisankan, (E. Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, 2015: 209). Pilihan kosakata, kalimat, paragraf dalam menulis sebuah pidato tidak jauh berbeda dengan kegiatan menulis naskah lainnya dan dipengaruhi oleh situasinya. Situasi tersebut menentukan kosakata dalam menulis. Berkaitan dengan kosakata, terdapat beberapa kosakata yang santun dan tidak baku, di antaranya:

(1) Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*.

Kalimat (1) merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa Inggris yang dapat digantikan dengan bahasa Indonesia sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan kosakata berbahasa Inggris *making delivered* dapat diubah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang artinya sama dengan kata yang dimaksud. Kosakata berbahasa Inggris tersebut dapat diubah dengan menggunakan kata yang mendekati artinya dan baku, yaitu ‘melayani dan mengayomi’.

(2) Tahun kedua, ada halal-bihalal lagi. Protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bisik-bisik, saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan menjadi kebiasaan, di titik itu lagi. Dan itu akan dianggap sebagai aturan. Dan kalau diteruskan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.” Duduknya apa, berdirinya di situ terus. Ini yang namanya monoton dan rutinitas.

Kalimat (2) tidak tepat dalam penggunaan kata ‘dan’. Kata ‘dan’ merupakan kata penghubung intrakalimat yang berfungsi menghubungkan antar kata dalam sebuah kalimat. Perbaikan untuk kalimat (2): Tahun kedua, ada halal-bihalal lagi. Protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bisik-bisik, saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan menjadi kebiasaan, di titik itu lagi. *Hal itu akan dianggap sebagai aturan dan jika terus-menerus dilanjutkan akan berakibat seperti undang-undang.*” Duduknya apa, berdirinya di situ terus. Ini yang namanya monoton dan rutinitas.

Penggunaan kalimat efektif pada naskah pidato Presiden RI berdasarkan hasil temuan data, diperoleh beberapa hal, di antaranya:

(1) Kita sudah hitung-hitung, kita sudah kalkulasi

Pada hasil temuan data (1), terdapat penggunaan kalimat yang tidak efektif karena tidak adanya kecermatan dalam pemilihan diksi. Selain itu, kalimat tersebut tidak hemat karena adanya Subjek yang sama sehingga tidak padu. Dengan demikian, kalimat tersebut dapat diubah menjadi: Kita sudah berhitung dan kalkulasi.

(2) Namun, semua itu tidak datang otomatis. Tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras dan kita harus kerja cepat. Harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif.

Pada hasil temuan data (2), diperoleh penggunaan kalimat yang tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahasa verbal sehingga kalimat tersebut tidak memenuhi syarat kalimat efektif, seperti kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kelogisan, dan kehematan. Dengan demikian, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi: Namun, semua itu tidak datang dengan mudah sehingga harus disertai kerja keras dan bekerja cepat. Selain itu, disertai produktivitas kinerja bangsa.

(3) Saya sering mengingatkan kepada para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan. Sering kali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Programnya sudah terlaksana, Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.

Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya. Yang utama itu adalah hasilnya. Dan cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Di situ ada *sent*, artinya telah terkirim.

Ada *delivered*, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin *delivered*, bukan hanya menjamin *sent*.

Dan saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya *sending-sending* saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat.

Pada hasil temuan data (3), diperoleh penggunaan kalimat yang tidak efektif. Hal ini dikarenakan penggunaan diksi yang tidak tepat, ejaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kecermatan, kehematan, kesatuan, kepaduan, kelogisan, dan keparalelan. Dengan demikian, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi: Saya sering mengingatkan kepada para menteri, tugas mereka bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan. Akan tetapi, tugasnya adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, birokrasi sering kali melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Apabila saya menanyakannya, jawabnya “Programnya sudah terlaksana, Pak.” Akan tetapi, setelah dicek di lapangan dan dicek ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaatnya dan belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya. Yang utama itu adalah hasilnya. Cara mengeceknya pun mudah. Contohnya, saat kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Di situ ada *sent*, artinya telah terkirim. Ada *delivered*, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin *delivered*, bukan hanya menjamin *sent*. Saya juga tidak mau birokrasi hanya bekerja *sending-sending*. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*. Tugas birokrasi kita adalah menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat.

Penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada Pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR RI dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024, Jakarta, 20

Oktober 2019 merupakan perwujudan dalam situasi resmi dan formal yang baik dipergunakan untuk penggunaan bahasa yang baik. Hal ini karena berkaitan dengan norma bahasa yang dikaitkan dengan nilai kearifan. Berkaitan dengan pidato tersebut, penggunaan bahasa yang benar belum memenuhi kaidah bahasa. Kaidah bahasa tersebut meliputi ejaan, pembentukan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Salah satu contoh kalimatnya adalah:

**Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton.**

Pada kalimat tersebut, utamanya tidak benar dalam penggunaan tanda baca sehingga unsur kalimatnya tidak diketahui Subjek, Predikat, Objek, dan Keterangan.

Dengan demikian, berdasarkan temuan data dan hasilnya diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan pidato dapat disusun berdasarkan nilai-nilai kearifan dan menggunakan kaidah serta tata bahasa Indonesia yang berlaku, seperti kosakata yang santun dan baku, dan penggunaan kalimat efektif. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga peluang penggunaan bahasa Indonesia baik nasional maupun internasional mampu tumbuh dan berkembang. Hal lainnya adalah pidato yang disampaikan hendaknya mampu dipahami oleh pendengarnya sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara serta berdampak positif pada bidang lainnya.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara umum, berdasarkan pendahuluan, teori dan metodologi, temuan dan hasil pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa peluang bahasa Indonesia sebagai nilai kearifan pada Pidato Presiden RI Tahun 2019 memiliki ruang yang cukup baik untuk tumbuh dan berkembang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres tersebut merupakan pengganti Perpres Nomor 16 Tahun 2010. Dengan adanya Perpres tersebut, maka penyebaran bahasa Indonesia dapat diketahui melalui forum pidato presiden baik nasional maupun internasional. Secara khusus, kesimpulan penelitian ini adalah penyusunan naskah pidato dengan menggunakan bahasa Indonesia dapat menggunakan tata bahasa dan aturan PUEBI yang berlaku. Selain itu, penyusunan naskah pidato dapat dilakukan sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun, saran yang direkomendasikan adalah hendaknya para penggiat literasi dan para pejabat pemerintah disertai segenap masyarakat melestarikan bahasa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Contoh penggunaan bahasa Indonesia melalui pidato sesuai dengan situasi dan kondisinya serta menerapkan kaidah berbahasa Indonesia dengan konsisten. Dengan adanya peluang penggunaan bahasa Indonesia pada pidato, maka bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa, media informasi dan komunikasi pembelajaran, serta dikenal oleh negara lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Yusuf, dkk., 2017. *Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Buku Pegangan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Alwi, Hasan, dkk., 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- AR., Syamsuddin, dan Vismaia S. Damaianti. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arifi, E. Zaenal, dan S. Amran Tasai. 2015. *Bahasa Indoensia sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*. Tangerang: PT Pustaka Mandiri.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf>
- Badan Pengembangan Dan Penelitian Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Prosedur Operasional Standar Penelitian Bahasa dan Sastra*. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/POS%20Penelitian%20Bahasa%20dan%20Sastra.pdf>
- Daniah. 2016. Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Sebagai Basis Pendidikan Karakter. *Jurnal Ar-Raniry*. Vol. 5, No. 2. <https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Pionir/Article/View/3356>.
- Dardiri, Ahmad. *PENDIDIKAN DASAR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN HAK ANAK: Reorientasi Model Penyelenggaraan Pendidikan Dasar*
- Gani, Ramlan A. 2014. *Suka Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Irawan. *BAB II Kajian Pustaka*. <http://eprints.umm.ac.id/35955/3/jiptummpp-gdl-irawansatr-48429-3-babiip-f.pdf>
- Kompas. 2019. *Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 Jakarta, 20 Oktober 2019*. <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>:
- Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya.
- Repository USU. *BAB II Konsep, Kerangka, dan Kajian Teori*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39569/Chapter%20II.pdf;sequence=3>
- Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Suyatno, dkk. 2014. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi (Membangun Karakter Mahasiswa Melalui Bahasa)*. Bogor: in Media.
- Syam, Nur. 2010. *Pendidikan dan Local Wisdom*. [nursyam.uinsby.ac.id > wp-content > uploads > 2010/07 > pendidikan-dan..](http://nursyam.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2010/07/pendidikan-dan..)
- Senjawati, Nanik Dara. *Kearifan Lokal (Local Wisdom)*. [learning.upnyk.ac.id > mod > resource > view](http://learning.upnyk.ac.id/mod/resource/view)
- Upj. 2016 Green Policy. Pertemuan 8. [https://ocw.upj.ac.id > files > Slide-LSE-09-10-SED-2015-2016](https://ocw.upj.ac.id/files/Slide-LSE-09-10-SED-2015-2016)
- Zaim, M. 2014. *Metode Penelitian Bahasa. Pendekatan Struktural*. <http://repository.unp.ac.id/1830/1/Buku%20Metode%20apenelitian%20Bahasa.pdf>